

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat (Rizal & Rizal, 2023). Salah satu subsektor yang memiliki peran penting adalah tanaman pangan, khususnya padi, karena menjadi sumber utama kebutuhan pangan masyarakat Indonesia (Rigi *et al.*, 2019). Subsektor ini juga berperan langsung dalam penyediaan kebutuhan pokok dan menjaga ketahanan pangan nasional, serta menjadi sumber pendapatan utama bagi petani di berbagai daerah.

Salah satu komoditas tanaman pangan yang sangat penting adalah tanaman padi. Padi (*Oryza sativa L.*) merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia (Rigi *et al.*, 2019). Tanaman padi jenis rumput-rumputan yang memiliki peran penting karena beras yang berasal dari padi menjadi makanan pokok utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia (Nararya *et al.*, 2017). Oleh karena itu, peningkatan produktivitas padi menjadi prioritas dalam pembangunan sektor pertanian. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas tersebut adalah ketersediaan sarana produksi, khususnya pupuk (Ghassani & Supyandi, 2024).

Pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan petani. Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pertanian, pemerintah menetapkan kebijakan pupuk bersubsidi sebagai bentuk intervensi untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil usaha tani. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau serta tepat sasaran bagi petani (Kurnia, 2024). Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Namun, dalam pelaksanaannya, distribusi pupuk bersubsidi masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterlambatan penyaluran, ketidaksesuaian jumlah dan jenis pupuk, serta harga

yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas distribusi pupuk bersubsidi masih belum optimal (Lubis *et al.*, 2024).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan sistem digital berbasis data yaitu Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Sistem e-RDKK merupakan inovasi dalam tata kelola distribusi pupuk bersubsidi yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi data petani, transparansi alokasi pupuk, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi (Kurniawan *et al.*, 2023). Selain itu menurut Rusydiana, (2016) e-RDKK merupakan salah satu acuan dalam pemberian jumlah pupuk yang di distirbusikan oleh pemerintah.

Melalui sistem e-RDKK, pendataan petani dilakukan secara digital dengan mencantumkan identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, serta kebutuhan pupuk. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan alokasi pupuk bersubsidi sehingga diharapkan distribusi pupuk dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, sistem ini juga mendukung prinsip distribusi pupuk bersubsidi yang dikenal dengan konsep “lima tepat”, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, dan tepat prosedur penebusan (Ragimun *et al.*, 2020). Meskipun demikian, implementasi sistem e-RDKK di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain keterlambatan input data, rendahnya pemahaman petani terhadap sistem digital, serta ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi nyata di lapangan (Hani *et al.*, 2024).

Secara lokal, Desa Bareng yang terletak di Kecamatan Ngasem merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bojonegoro dengan potensi pertanian yang cukup tinggi serta didukung oleh keberadaan kelompok tani yang aktif. Kondisi lahan yang relatif subur, serta keaktifan kelembagaan petani dan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertanian menjadikan Desa Bareng sebagai lokasi yang strategis untuk menilai sejauh mana efektivitas implementasi sistem e-RDKK dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Namun demikian, berdasarkan kondisi di lapangan, masih ditemukan berbagai

permasalahan dalam distribusi pupuk bersubsidi, seperti keterlambatan penyaluran, keterbatasan alokasi, serta ketidaksesuaian jenis pupuk dengan kebutuhan petani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas distribusi pupuk bersubsidi melalui sistem e-RDKK masih perlu dikaji lebih lanjut secara mendalam.

Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas efektivitas distribusi pupuk bersubsidi secara umum, tanpa mengkaji secara spesifik pengaruh sistem e-RDKK sebagai sistem digital dalam meningkatkan efektivitas distribusi pupuk di tingkat petani. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan fokus pada analisis pengaruh sistem e-RDKK terhadap efektivitas distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan indikator lima tepat di tingkat desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Sistem e-RDKK terhadap Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Usaha Tani Padi di Desa Bareng Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun rumusan masalah dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat penerapan sistem e-RDKK pada usaha tani padi di Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro?
2. Apakah sistem e-RDKK berpengaruh terhadap efektivitas distribusi pupuk bersubsidi pada usaha tani padi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem e-RDKK pada petani padi di Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem e-RDKK terhadap efektivitas distribusi pupuk bersubsidi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang agribisnis terkait sistem digital pertanian (e-RDKK) dan distribusi pupuk bersubsidi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian di bidang agribisnis.
- b. Bagi petani, memberikan informasi mengenai manfaat dan kemudahan penggunaan sistem e-RDKK dalam memperoleh pupuk bersubsidi.
- c. Bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dan juga bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem e-RDKK.
- d. Bagi pembaca, dapat digunakan untuk dasar atau rujukan dalam penelitian lanjutan yang membahas sistem distribusi pertanian berbasis digital.

1.5 Batasan Masalah

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada distribusi pupuk bersubsidi melalui system e-RDKK pada usaha tani padi di Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain.
- b. Responden dalam penelitian ini terbatas pada petani padi yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam system e-RDKK sebagai penerima pupuk bersubsidi di Desa Bareng.
- c. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh system e-RDKK sebagai variabel independent terhadap efektivitas distribusi pupuk bersubsidi sebagai variabel dependen, dan tidak membahas variable lain di luar penelitian

- d. Pengukuran efektivitas distribusi pupuk bersubsidi dalam penelitian ini dibatasi pada prinsip lima tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, dan kemudahan prosedur pennebusan.
- e. Penelitian ini menggunakan data dalam satu periode waktu (cross-sectional), sehingga tidak menggambarkan perubahan distribusi pupuk bersubsidi dalam jangka panjang.